

POLA PERUBAHAN, WACANA, DAN TREN KONFLIK SOSIAL DI INDONESIA

Muliono

UIN Imam Bonjol Padang

muliono191@gmail.com

Abstract

The social history of Indonesia has recorded many types of conflict with serious impacts. The character of conflict in Indonesia has gradually changed. This study aims to elaborate the trends and patterns of the conflict changes in Indonesia, mapping the basic issues of the conflict, and offering the ideas of deconstruction to the discourse of plurality on ethnicity, religion, race, and inter-groups that tend to be seen as the causes of conflict. This study shows that the changing of violent conflict's character in Indonesia is strongly influenced by the developments of a regime's socio-economic and political climate dynamics. Under this reason, to understand the phenomenon of conflict in Indonesia cannot be strictly based on the plurality of ethnicity, religion, race, and inter-group issues, although the experiences of communal conflicts that have occurred have shown the ideological articulations that legitimize the use of violence related to ethnicity, class, and religious affiliation. Through the deconstructive approach, this study negates that the root of violent conflict comes from the character of local communality. On the contrary, the plurality of ethnicity, religion, and race should be seen as the social capital that worthwhile as the local mechanisms in resolving the various conflicts and as a means of empowerment.

Keywords: Trend, Pattern of Conflict, Deconstruction

Abstrak

Sejarah sosial Indonesia mencatat banyak jenis konflik yang berdampak serius. Karakter konflik di Indonesia berangsur-angsur berubah. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi tren dan pola perubahan konflik di Indonesia, memetakan isu-isu dasar konflik, dan menawarkan gagasan dekonstruksi terhadap wacana pluralitas suku, agama, ras, dan antarkelompok yang cenderung dilihat sebagai penyebab konflik. Studi ini menunjukkan bahwa perubahan karakter konflik kekerasan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan dinamika iklim sosial ekonomi dan politik suatu rezim. Oleh karena itu, memahami fenomena konflik di Indonesia tidak dapat secara tegas didasarkan pada kemajemukan etnis, agama, ras, dan masalah antarkelompok, meskipun pengalaman konflik komunal yang terjadi telah menunjukkan artikulasi ideologis yang melegitimasi penggunaan kekerasan yang terkait dengan etnis, kelas, dan afiliasi agama. Melalui pendekatan dekonstruktif, studi ini menyangkal bahwa akar konflik kekerasan bersumber dari karakter komunalitas lokal. Sebaliknya, pluralitas suku, agama, dan ras harus dilihat sebagai modal sosial yang bermanfaat sebagai mekanisme lokal dalam menyelesaikan berbagai konflik dan sebagai sarana pemberdayaan.

Kata Kunci: Tren, Pola Konflik, Dekonstruksi

1. PENDAHULUAN

Studi mengenai konflik di Indonesia mulai banyak diungkap dan dipublikasi sejak keruntuhan rezim Orde Baru. Berakhirnya Orde Baru dan beberapa tahun berikutnya (1998-2003) atau yang dikenal sebagai masa transisi menuju konsolidasi demokrasi, masyarakat Indonesia terjerembab dalam dinamika konflik kekerasan (*riot*) yang terjadi hampir di seluruh daerah dan memakan korban pada skala yang cukup tinggi. Jenis konflik yang terjadi pada masa ini kemudian diistilahkan dengan kerusuhan sosial yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, antar golongan, suku, ras, dan agama. Pasca tahun 2003 konflik kekerasan berskala tinggi dapat diresolusi seperti konflik di Aceh, Ambon-Maluku, Kalimantan, dan Sulawesi, sehingga tingkat konflik kekerasan yang menyebabkan kematian mengalami penurunan secara signifikan hingga tahun 2008.¹ Sementara sebagian konflik lain tetap terus berlanjut hingga sampai sekarang seperti konflik segregasi di Papua, dan berbagai konflik lain dengan pola baru yang juga tersebar di seluruh wilayah berkaitan isu dengan perebutan sumber daya, masalah politik, dan masalah identitas.

Situasi memprihatinkan pada masa transisi (1998-2003) menjadi catatan penting dalam mempelajari dinamika, potensi, dan keberlanjutan konflik di Indonesia serta menjadi titik pijak dalam studi resolusi konflik: pencegahan, pengelolaan, dan penyelesaian konflik. Setting sosial masyarakat Indonesia yang plural baik dari segi suku, etnis, maupun agama (SARA) pada umumnya dijadikan oleh sebagian besar mereka yang mendalami studi konflik sebagai “tersangka” penyebab akar konflik dan keberingasan sosial yang pernah terjadi di daerah konflik berskala tinggi.² SARA sebagai akronim dari suku, agama, ras, dan antar-golongan juga dipandang sebagai tantangan utama dalam mana potensi masyarakat Indonesia di masa akan datang rentan terjembab ke dalam konflik dan perpecahan.

Studi ini dimaksudkan memberi gambaran mengenai tren konflik, pemetaan isu yang menjadi basis konflik, serta memproyeksikan bagaimana kemungkinan dan potensi konflik yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Tulisan ini juga mengajukan suatu cara pandang dekonstruksi terhadap wacana pluralitas masyarakat Indonesia yang selalu dijadikan sebagai akar dan sumber konflik. Data dalam studi ini dikumpulkan melalui data sistem nasional pemantauan kekerasan Indonesia atau *national violence monitoring system dataset* (SNPK/NVMS), *united nation support facility for indonesia recovery* (UNSFIR), *conflict and development program*, laporan penelitian kerjasama Yayasan Wakaf Paramadina (YWP), Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Gadjah Mada (MPRK-UGM), dan The Asia Foundation (TAF), dan laporan media sosial terkait dengan konflik yang terjadi antara 2016-2020. Dengan demikian, studi ini menyuguhkan kajian konflik dan pola baru kekerasan di Indonesia sejak masa 1997 hingga tahun 2019.

¹ Penurunan ini tidak berarti bahwa konflik kekerasan berakhir, akan tetapi menghadirkan rembesan lain yang dalam bentuk konflik kekerasan rutin yang juga terjadi di berbagai daerah dan berdampak signifikan terutama di daerah-daerah yang telah mengalami konflik berskala tinggi.

² Baik itu dari kalangan ahli/pengamat maupun narasi dari pemerintah begitu kuat kecenderungannya menjadikan wacana SARA sebagai dasar akar konflik komunal. Berbagai studi telah banyak mengulas dengan penekanan pada SARA sebagai sumber konflik.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1. Mendefinisikan Konflik Sosial

Konflik dapat didefinisikan sebagai benturan kepentingan dari dua aktor atau lebih. Lebih lanjut, benturan kepentingan biasanya memproduksi berbagai ekspresi yang disalurkan dalam berbagai cara untuk mencapai tujuan di antara aktor yang terlibat baik dalam bentuk kekerasan (*violence conflict*) maupun dalam bentuk yang damai (*peaceful conflict*). Defenisi aktor yang dimaksud dapat menunjuk kepada individu dan kelompok.³ Merujuk kepada Bartos dan Wehr (2002), ada tiga konsep penting dalam memahami konflik sosial yaitu benturan dan ketidaksesuaian tujuan (*goal incompatibility*), permusuhan (*hostility*), dan perilaku konflik (*conflict behavior*). Tiga konsep ini diambil dari formulasi defenisi yang mereka ajukan, bahwa konflik *as a situation in which actors use conflict behavior against each other to attain incompatible goals and/or to express their hostility*.

Defenisi Bartos dan Wehr setidaknya dapat mewakili pengertian konflik sosial baik yang terjadi pada tingkat mikro maupun pada tingkat makro. Pada tingkat mikro konflik dapat dilihat antara individu versus individu dan pada tingkat makro dapat dilihat pada tindakan kolektif antara kelompok versus kelompok (*konflik horizontal*), dan kelompok versus pemerintah (*konflik vertikal*). Sebagian ahli lain memfokuskan defenisi konflik kepada praktik dan dampak yang ditimbulkan seperti Fisher. Fisher (dalam Irwandi & Chotim, 2017) mengungkapkan konflik merujuk kepada tindakan, sikap, perkataan, serta struktur atau sistem yang mengakibatkan berbagai kerusakan baik secara fisik, non-fisik, dan sosial. Pendefinisian seperti ini berfungsi untuk mempermudah dalam melihat dan mendokumentasikan konflik yang terjadi, sehingga kemudian berbagai laporan mengenai konflik mendasarkan datanya kepada dampak empiris yang bisa diamati secara kasat mata seperti kerusakan bangunan, luka fisik, maupun pada korban yang mati.

Berbagai teoritikus telah mendedah fenomena konflik yang dapat dijadikan sebagai cara pandang dan sekaligus pendekatan dalam menganalisis konflik sosial. Berbagai pendekatan itu antara lain dapat ditelusuri pada perspektif Ibn Khaldun (Affandi, 2004; Ritzer & Goodman, 2014), Sigmund Frued (Deutsch et al., 2016), dan Erich Fromm (2008). Sementara pada skala makro konflik sosial dapat dekati atau dianalisis dengan pendekatan Marx, Dahrendorf, Wright Mills, Lewis Coser, George Simmel (Ritzer & Goodman, 2014; Susan, 2014), dan Amartya Sen (2016). Berbagai tindakan kekerasan dapat juga didekati dengan perspektif Pierre Bourdieu (Fatmawati, 2020; Ningtyas, 2015) sebagai tokoh kontemporer yang belakangan banyak diperbincangkan. Kemudian, untuk pendekatan resolusi konflik dapat didekati misalnya pada konsep Johan Galtung (Galtung & Fischer, 2013).

Ke semua perspektif ini merupakan pandangan dasar ataupun sebagai alat analisa untuk memahami konflik dan kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat

³ Antonio Giddens secara lebih memadai menggunakan istilah aktor dalam teorinya mengenai strukturasi. Istilah aktor yang digunakan Giddens menunjuk baik kepada individu ataupun kelompok. Melalui strukturasi, Giddens berupaya untuk mengatasi dikotomi antara struktur dan agen/aktor dalam memahami dunia sosial dan praktiknya. Strukturasi mengandaikan adanya hubungan yang saling memengaruhi satu sama lain antara aktor dan struktur yang membentuk dunia sosial.

secara lebih memadai. Pada perkataan lain, ketika membicarakan konflik yang tidak boleh abai dari pemahaman kita adalah, terdapat “akar-akar” sosial yang lebih luas yang melatari terwujudnya konflik. Pada dasarnya konflik merupakan suatu yang inheren dalam kehidupan sosial. Tidak ada masyarakat yang lepas dari konflik. Dalam analisa Dahrendorf (Ritzer & Goodman, 2014) menegaskan, bahwa masyarakat memiliki “dua wajah” yaitu konflik dan konsensus yang tidak saja berada pada konteks “negara dan rakyat” melainkan juga pada setiap asosiasi yang ada di masyarakat (baca juga Simmel tentang asosiasi dan disosiasi).

2.2. Jenis Konflik

Fenomena konflik dapat diklasifikasi ke beberapa jenis. Pengklasifikasian ini penting untuk mempermudah memahami, menganalisis dan bahkan untuk mengelola konflik ke arah yang lebih konstruktif. Konflik sosial berdasarkan sifatnya dapat dibedakan kepada konflik laten dan manifes. Berdasarkan bentuknya dapat dibedakan kepada konflik horizontal dan vertikal. Berdasarkan penyalurannya konflik dapat dibedakan kepada konflik kekerasan (*violence conflict*) dan konflik yang disalurkan secara damai (*peaceful conflict*). Sementara berdasarkan isu yang menjadi pemicu konflik, merujuk kepada (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2015), dapat diklasifikasi kepada tujuh kategori yaitu konflik sumber daya, tata kelola pemerintahan, pemilihan umum dan jabatan, separatisme, identitas, main hakim sendiri, serta jenis konflik lainnya seperti kriminalitas, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan kekerasan dalam penegakan hukum. Untuk kepentingan studi ini akan menggunakan ketujuh kategori yang disebut di atas untuk dapat memetakan pola perubahan isu dan tren konflik yang terjadi di Indonesia berdasarkan pada data yang tersedia.

2.3. Tren Konflik di Indonesia

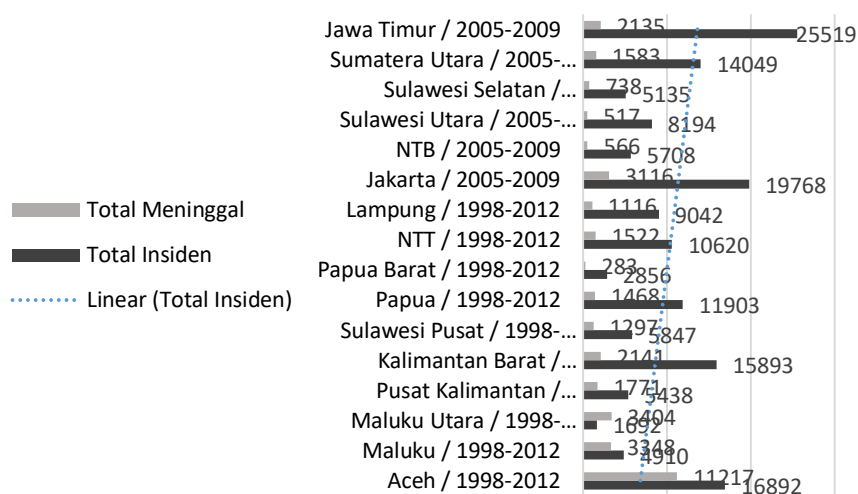
Indonesia setidaknya memiliki tiga periode waktu yang menjadi catatan penting dalam mengkaji dinamika konflik berwujud kepada kekerasan yaitu periode rezim Orde Baru, periode masa transisi awal (1997-2003), dan periode pasca reformasi (tahun 2004 hingga sekarang).⁴ Tiga periode ini memiliki pola konflik kekerasan yang berbeda dan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada masa Orde Baru konflik kekerasan lebih kepada konflik antara pemerintah versus rakyat. Konflik ini disebut dengan konflik vertikal dimana negara turut andil berada di balik konflik kekerasan terhadap masyarakat sipil terutama kepada mereka yang dilabel sebagai komunis (1965–1966) dan lebih dari setengah juta orang mengalami korban jiwa atas kekerasan yang dilakukan (Cribb, 1991; Heryanto, 2006; Kammen & Zakaria, 2012; Robinson, 1995). Sepanjang masa Orde Baru (1965–1997), aparat negara cenderung menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kendali dan membangun kekuasaan. Aparatus negara seperti militer yang memiliki penghasilan relatif kecil dari negara pun juga menggunakan tindakan kekerasan kepada masyarakat sipil untuk memperoleh tambahan penghasilan mereka (Liem Soei Liong, 2020).

⁴ Tiga periode ini didasarkan kepada ketercukupan studi yang diungkap dan data yang tersedia mengenai konflik terutama konflik berwujud kepada kekerasan. Tiga periode ini juga menghadirkan dampak yang cukup berpengaruh dalam melihat konflik masa kini di Indonesia.

Tindakan represi ini sebagian mendapat perlawanan bersenjata seperti terjadi di Papua, Aceh dan Timor Timur dengan melakukan gerakan separatis untuk memisahkan diri dari Indonesia. Gerakan separatis di Papua dari tahun 1964, Timor Timur dan Aceh sejak tahun 1976 dan seterusnya, mengakibatkan dentaman resistensi dan menewaskan masyarakat sipil pada skala yang begitu besar (Barron et al., 2014). Belakangan, Timor Timur berhasil memisahkan diri secara resmi dari Indonesia pada Mei 2002, Aceh memperoleh resolusi perdamaian tahun 2005 (lihat Asia Report, 2007; Fahmi, 2014), sementara Papua masih terus mengalami konflik segregasi atau gerakan separatis hingga sampai saat ini.

Jika konflik kekerasan pada periode Orde Baru lebih cenderung bersifat vertikal, pada periode transisi awal pasca keruntuhan rezim Orde Baru masyarakat Indonesia dihadapkan dengan konflik horizontal yaitu konflik komunal berbasis suku, agama, ras, dan antar-golongan yang terjadi hampir di seluruh daerah dan telah mengakibatkan banyak korban kematian. Situasi ini disebut sebagai konflik berskala tinggi khususnya di daerah yang merenggut banyak korban dan kerusakan fisik bangunan akibat konflik kekerasan yang terjadi.

Figure 1.
Tren Konflik Kekerasan Hingga Tahun 2012 Berdasarkan 16 Provinsi



Sumber: *Barron, at al., 2014*

Selama kurun lima tahun (1998-2003) setidaknya sejumlah 21.495 orang meninggal dunia (Barron et al., 2014).⁵ Dan, di antara peristiwa konflik yang terjadi terdapat enam provinsi yang dikategorikan sebagai daerah dengan konflik berskala tinggi dan berkesinambungan yaitu Aceh, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

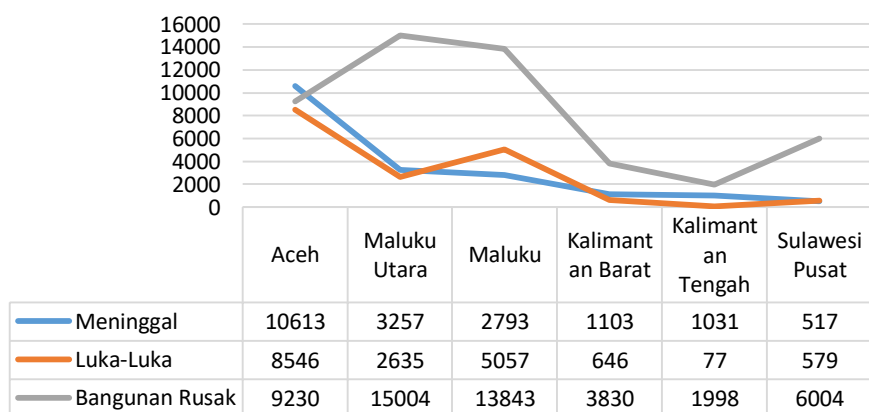
⁵ Data ini oleh Barron et.al., (2014) dikumpulkan dari dua sumber yaitu NVMS dan UNSFIR. Untuk daerah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Maluku, Maluku Utara, Aceh, Sulawesi Pusat, Nusa Tenggara Timur, Papua, and Papua Barat berasal dari NVMS atau SNPK; sementara Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Riau, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan berasal dari UNSFIR-2.

Di luar wilayah konflik kekerasan tersebut, konflik kekerasan yang muncul dari adanya kerusuhan berskala besar juga terjadi di Jakarta pada pertengahan Mei mendahului lengsernya masa kekuasaan Suharto atau yang dikenal dengan berakhirnya rezim Orde Baru, dan kerusuhan (*riot*) anti-Cina di kota Medan dan Solo (Purdey, 2006). Setidaknya sejumlah 1.193 orang meninggal dunia di Jakarta sementara kerusuhan di kota Solo menyebabkan 33 orang tewas dan diperkirakan mengalami kerugian mencapai 457 milyar akibat kerusakan bangunan fisik (Panggabean & Smith, 2011). Kekerasan dalam bentuk lain juga terjadi seperti bom Bali tahun 2002 menewaskan hingga sampai 200 orang, penyerangan di kedutaan Australia tahun 2004 dan bom nunuh diri di hotel Marriot Jakarta tahun 2003 dan 2009.⁶

Artinya, meskipun bentuk konflik kekerasan berskala tinggi dengan dampak yang begitu besar pada masa transisi kekuasaan pasca Orde Baru terkonsentrasi di beberapa provinsi, namun episode kekerasan komunal terjadi hampir di semua daerah (lihat figure 1). Situasi pada waktu ini bahkan disebut sebagian analis (Aspinall & Berger, 2001) bahwa Indonesia memiliki resiko perpecahan sebagaimana terjadi di daerah Yugoslavia (1990-2001) atau di daerah India (1947). Akibat konflik komunal berbasis SARA menjadikan negara ini terpecah-belah dan menelan korban dalam jumlah yang sangat banyak. India terpecah menjadi dua yaitu Pakistan dan India (Mittal & Ranjan, 2016). Sementara konflik berbasis komunal di Yugoslavia yang terdiri dari berbagai suku mengakibatkan genosida etnis besar-besaran dan disebut sebagai konflik genosida terbesar setelah perang dunia kedua.

Figure 2.

Jumlah Total Dampak Kekerasan Di Indonesia Pada Masa Transisi Awal



Sumber: *World Bank, 2010; Barron et al., 2014*

Periode 1998-2003 memang merupakan periode dimana perubahan iklim politik, sosial, dan ekonomi pada aras nasional yang didorong oleh, secara bersamaan, transisi sistem otoritarianisme kepada sistem demokrasi, dari sistem pemerintahan sentralisasi kepada desentralisasi, dan perubahan struktur

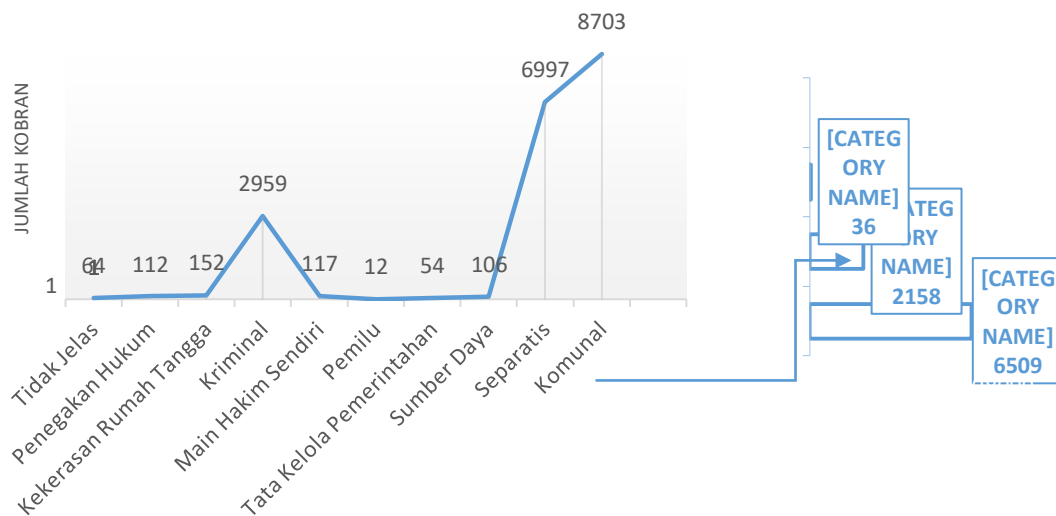
⁶ Isu bom bunuh diri pada banyak analis lebih dinisbahkan kepada fundamentalisme agama atau yang disebut dengan terorisme. Berbagai studi mengenai ini juga telah banyak diungkap dan sejak beberapa tahun belakangan isu terorisme dan radikalisme menjadi salah satu isu yang cukup hangat diperdebatkan hingga sampai sekarang baik pada aras lokal maupun global.

perekonomian pasca krisis moneter di Asia. Perubahan iklim pada aras nasional menjadi gelombang kritis karena dihadapkan dengan tuntutan reformasi di berbagai bidang sistem tata kelola pemerintahan dan kehidupan bersama, sementara pada saat bersamaan adanya kegagalan dalam menanggapi bagaimana forma reformasi yang akan dibentuk (lihat juga Bertrand, 2004).

Atas kondisi itu, para pemimpin lokal di berbagai daerah kerap menanggapi perubahan iklim sosial politik secara gagap, dan cenderung menggunakan kekerasan untuk memperkuat dan atau memperluas kendali mereka pada arena politik dan ekonomi lokal (Klinken, 2007). Kegagalan dalam menghadapi perubahan iklim sosial, ekonomi, dan politik menyebabkan terjadinya tragedi di antara kelompok masyarakat berdasarkan pada suku, agama, ras, antar-golongan, serta aparatus negara dengan masyarakat sipil. Oleh Tajima (2013), lemahnya kapasitas dan campur tangan aparatus keamanan pada berbagai sengketa masyarakat di aras lokal juga memicu dimungkinkan terjadinya eskalasi kekerasan. Pada akhirnya, Indonesia terjerembab mengalami berbagai kekerasan skala tinggi yang lebih kurang sekitar setengah dekade di banyak wilayah.

Figure 3.

Bentuk Konflik Kekerasan Dan Jumlah Korban Jiwa Masa Transisi Awal (1998-2003) Berdasarkan Delapan Provinsi⁷



Sumber: *Barron et al., 2014*

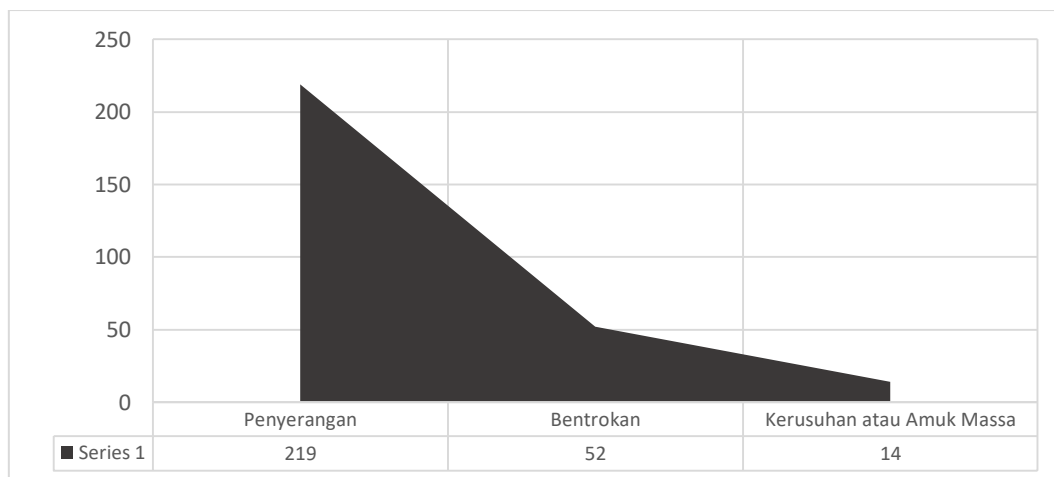
Pola konflik pada periode masa transisi awal (1997-2003) dikarakteristikkan dengan konflik komunal. Data di atas memperlihatkan tingginya angka kekerasan yang dilatari oleh konflik komunal, terutama konflik terbesar adalah konflik berbasis pada agama dan antar etnis. Berdasarkan studi Ali-Fauzi et al (2009) menyajikan data yang jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan data di atas. Studi mereka menunjukkan hanya sebanyak 832 insiden konflik keagamaan yang terjadi di Indonesia rentang periode waktu antara Januari 1990 hingga Agustus 2008. 547 (66%) di antaranya adalah aksi damai, dan 285

⁷ Aceh, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Kalimantan Barat.

(34%) aksi kekerasan. Sebaran aksi kekerasan tersebut dapat dilihat pada figur 3 di bawah.

Temuan ini memperlihatkan ada pola perubahan yang cukup berarti. Konflik yang selama ini disalurkan secara kekerasan (*violence*) mengambil pola kepada cara cara yang lebih konstruktif dan damai, yaitu melalui jalur aksi protes menyuarakan “kepentingan” masyarakat dengan jalan demokratis. Hanya sekitar 34% selama 18 tahun tindakan konflik berwujud kekerasan. Sebagai pemerhati konflik, jumlah ini sangat penting untuk diwaspadai terutama dalam membicarakan kesadaran masyarakat untuk mengelola konflik dan dalam rangka menciptakan moderasi baik itu moderasi beragama maupun moderasi dalam kehidupan sehari hari misalnya moderasi dalam memaknai identitas.

Figur 4.
Sebaran Aksi Kekerasan berbasis Agama



Sementara itu, isu yang mendorong terjadinya kekerasan berbasis keagamaan dapat dilihat pada tabel 5. Konflik bernuansa agama menarik untuk dicermati khususnya bagi mereka yang mendalami bidang kajian studi agama-agama. Telah banyak studi mencoba mengungkap konflik berbasis agama. Sebagian melihat dari sisi bagaimana agama sebagai spirit membangun perdamaian misalnya studi Silvestri (2015), sementara yang lain menempatkan analisa agama sebagai jalan masuk dan mengekspresikan tindakan radikalisme seperti misalnya studi yang diungkap PPIM UIN Jakarta dan Convey Indonesia (2017).

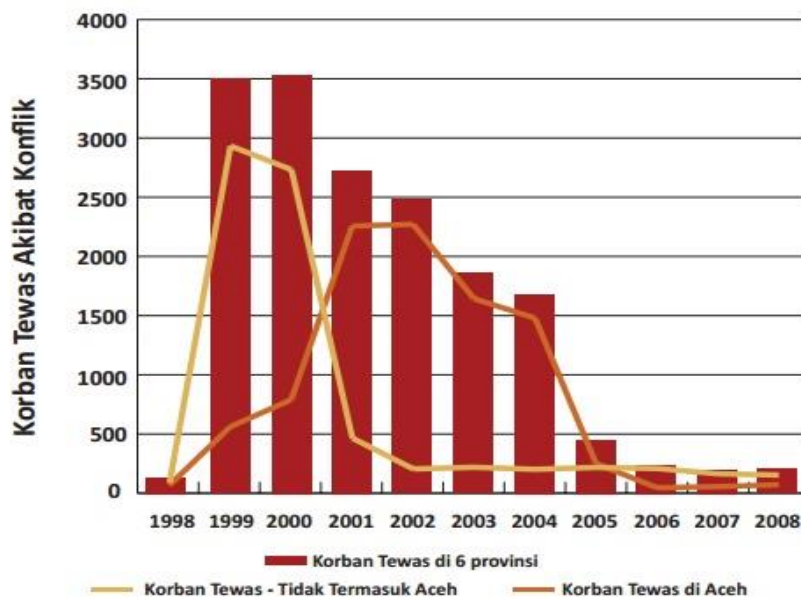
Tabel 5.
Isu Konflik Etno Nasionalisme Dan Keagamaan

Isu Konflik	Deskripsi
Moral	Perjudian, minuman keras, perbuatan asusila, pornografi.
Sektarian	Konflik mengenai interpretasi ataupun pemahaman ajaran dan status suatu kelompok keagamaan misalnya ahmadiyah, syiah, Al Qiyadah Al Islamiyah, dan HKBP.
Komunal	Konflik yang terjadi di antara komunitas agama misalnya Muslim-Kristen; Konflik antara kelompok agama karena adanya penodaan agama.

Terorisme	Tindakan penyerangan ataupun teror dengan sasaran kelompok keagamaan ataupun kepada kelompok non keagamaan tetapi dilakukan oleh kelompok agama tertentu.
Politik-keagamaan	Sikap anti kebijakan dan anti ideologi/kebudayaan asing, termasuk di sini seperti isu politik-keagamaan: penerapan Syariah Islam, khilafah, serta pro-kontra kebijakan pemerintah yang memiliki dampak kepada kelompok keagamaan tertentu.
Mistisisme	Isu subkultur keagamaan mistis seperti santet dan tenung

Periode pasca transisi pergolakan konflik bernuansa kekerasan yang menyebabkan kematian telah mengalami penurunan signifikan hingga tahun 2008 (lihat figure 6) dan hingga 2012 konflik ini mengalami deeskalasi secara menyeluruh di daerah yang dikategorikan sebagai daerah konflik berskala tinggi (lihat figure 7).

Figure 6.
Tren Korban Tewas Akibat Konflik-Aceh, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, Dan Papua Barat Tahun 1998-2008



Sumber: Bank Dunia, Indonesia, 2010

Konflik berskala besar mengakibatkan korban tewas di Aceh, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat tahun 1998-2008 mengalami penurunan signifikan. Namun demikian angka-angka deeskalasi tersebut belum berarti bahwa atmosfir sosial masyarakat Indonesia telah membaik secara utuh dan berada dalam harmoni sosial. Sejak 2008 hingga 2015 konflik kekerasan berskala rutin justru terjadi dengan pola dan bentuk yang berbeda. Kerusuhan (*riot*) serta pertikaian antar-kelompok tetap terjadi meski dalam jumlah kecil. Pola kekerasan yang terjadi lebih mengarah kepada bentuk perkelahian dan penganiayaan. Konflik identitas juga tetap terjadi dengan latar isu moral, ketersinggungan dan main hakim sendiri yang menyebabkan banyak jatuh korban kematian (lihat figur 7, 8 dan 9).

Enam provinsi (lihat figure 6) berdasarkan data World Bank (2010), sejak tahun 2006 rata-rata mengalami sekitar 2.000 peristiwa konflik per tahun dalam

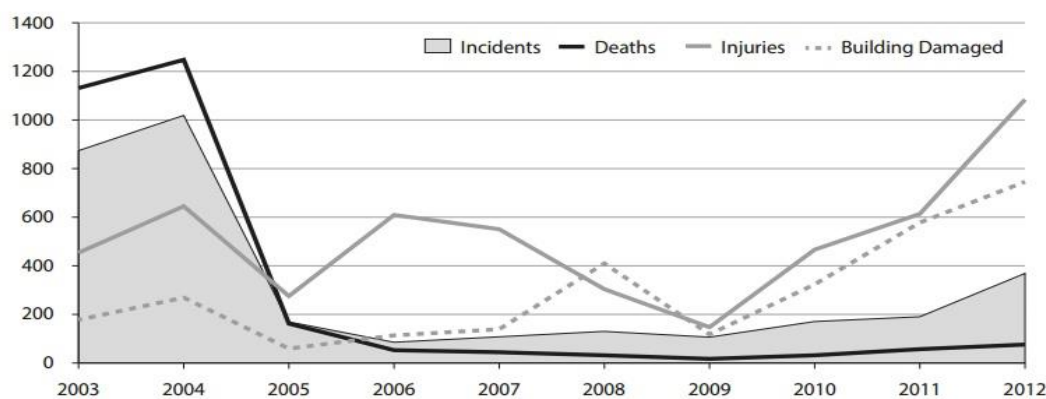
bentuk aksi kekerasan.⁸ Rentang periode tahun 2006-2008, konflik yang muncul berdampak pada kematian sekitar lebih dari 600 orang, dan 6.000 orang korban luka-luka, serta menyebabkan hingga lebih dari 1.900 bangunan fisik mengalami rusak. Bentuk konflik yang terjadi adalah pertikaian antar-kelompok (*geng*), protes dan demonstrasi terhadap kebijakan pemerintah yang disertai aksi keriuhan, main hakim sendiri berupa pengeroyokan terhadap pencuri, dan konflik-konflik lain dilatari oleh persoalan konflik kepemilikan tanah.⁹

Konflik berskala rutin meskipun pada sejumlah kecil tetap menjadi kekhawatiran karena jika tidak dikelola dengan baik akan dapat menjadi faktor pemicu eskalasi konflik berskala besar. Apalagi, sisa konflik masa lalu masih tampak menyisakan “rasa laten” yang sewaktu-waktu dapat mengalami erupsi jika menemukan momentumnya. Artinya, tingginya tingkat kekerasan rutin dapat menjadi penanda akan adanya potensi eskalasi konflik sebagaimana konflik kekerasan berskala besar yang pernah terjadi pada rentang periode 1998-2003.

Secara gradual pola konflik di Indonesia mengalami perubahan. Rentang 1998 dan sebelumnya, pola konflik “disponsori” oleh negara dengan isu anti komunis, pada tahun 1999-2004 adalah konflik sesama masyarakat (konflik komunal) dengan isu utama adalah isu identitas atau SARA, sementara 2004-2015 cenderung pada isu moral moral/tersinggung, penganiayaan, dan perkelahian yang kemudian mengakibatkan berbagai kekerasan.

Figure 7.

Tren Konflik Kekerasan Kolektif Di Provinsi Dengan Konflik Skala Tinggi



Sumber; NVMS, 2012

Tren dampak konflik juga mengalami perubahan. Tingkat insiden mengalami kenaikan setelah tahun 2009, akan tetapi jumlah korban yang mati semakin kian sedikit. Dibanding tahun 2004, jumlah korban mengalami kematian jauh lebih besar ketimbang peristiwa dan dampak kerusakan pada bangunan fisik.

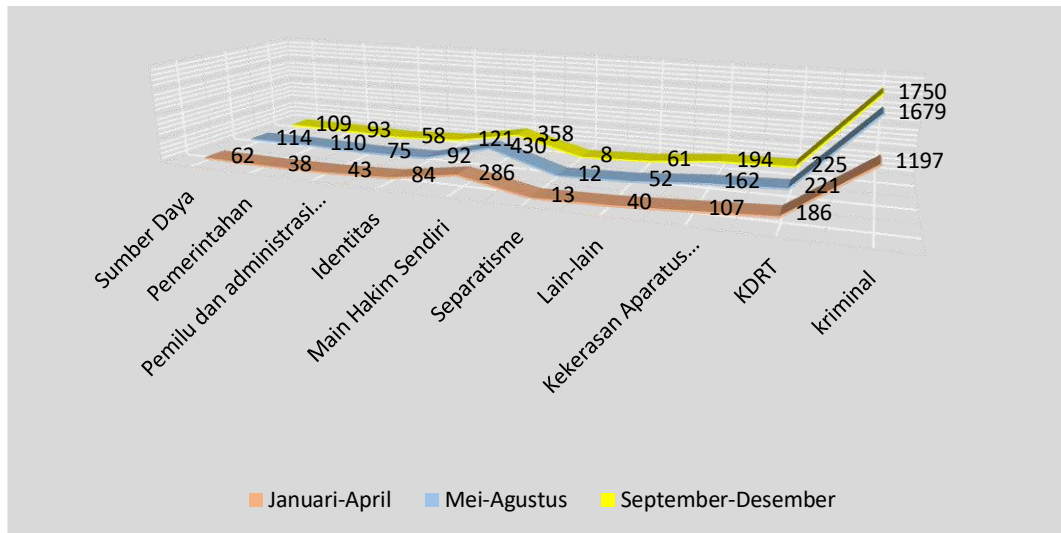
⁸ Enam provinsi ini dari segi jumlah kependudukan hanya berjumlah 4% dari total jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2006. Demikian, jika dikomparasi dengan fakta kekerasan yang terjadi, peristiwa konflik kekerasan ini cukup sangat besar dan mengkhawatirkan.

⁹ Konflik lahan tanah banyak dialami di berbagai daerah. Khusus di daerah Sumatera Barat konflik tanah lebih kepada tanah ulayat baik karena kepemilikan sepihak kepala adat untuk dijual atas kepentingan personal maupun konflik versus pemerintah karena adanya regulasi yang memungkinkan tanah ulayat tidak lagi menjadi milik masyarakat lokal.

Di tahun 2013 jenis konflik kekerasan yang besar adalah kriminal, KDRT, dan main hakim sendiri. Periode waktu dalam data ini (lihat figur 8) memiliki jumlah area yang berbeda. Januari-april terdiri dari sembilan provinsi. Mei-Agustus terdiri dari 13 provinsi. September-Desember terdiri dari 13 provinsi (lihat figur 8).

Figure 8.

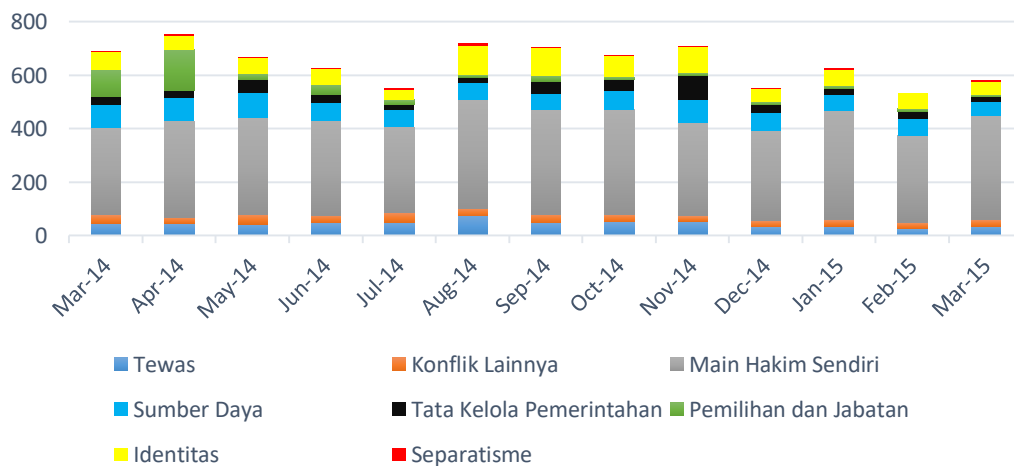
Tren Dan Bentuk Kekerasan Periode Januari-Desember 2013



Sumber: *The Habibie Center, 2013*

Figure 9.

Jumlah Insiden Dan Dampak Konflik Kekerasan Periode Maret 2014 Hingga Maret 2015



Sumber: *Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2015*

Periode 2016 hingga 2020 pola konflik dominan memiliki karakteristik konflik vertikal antara masyarakat sipil berhadapan dengan pemerintah. Masyarakat sipil di sini didominasi oleh kalangan umat Islam yang merasa secara politik termarginalkan. Berdasarkan pola penyalurannya, konflik pada periode ini

lebih disalurkan secara demokratis melalui unjuk rasa karena berbagai kebijakan yang ditelurkan pemerintah dianggap “tidak sehat” dan menyisakan rasa ketidakadilan. Gerakan mobiliasi massa yang dilakukan sangat kental dengan nuansa keagamaan terutama setelah adanya kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Gubernur Jakarta). Gerakan bernuansa keagamaan melahirkan protes hingga sampai pemilu 2019. Gerakan pada periode ini adalah merupakan gerakan terbesar dalam memobilisasi massa dalam sejarah Indonesia.¹⁰

Aksi protes pada pemilu 2019 dilatari rasa tidak adil dan kecurigaan terhadap KPU misalnya kotak suara yang terbuat dari kerdus, pengumuman hasil pemungutan suara pada malam hari dan adanya kecenderungan narasi yang meresahkan dari negara terhadap harmoni sosial masyarakat. Apa yang menarik ialah, masyarakat kemudian tepolarisasi kepada dua kubu yaitu kelompok pro pemerintah dan kontra pemerintah. Kelompok masyarakat yang kontra pemerintah bukan saja mereka berhadapan dengan pemegang kekuasaan di eksekutif tetapi juga berhadapan dengan kelompok pro pemerintah. Pemilu 2019 memang masih banyak menyisakan paradoks yang belum terungkap, terutama terkait dengan kematian petugas KPPS, oleh Kompas.com (2020) sejumlah 894 orang.

Di samping itu, terdapat sejumlah korban luka-luka dan kematian dalam gerakan protes 2019. Berdasarkan data diungkap Kompas.com (2020) sebanyak 7 orang meninggal dunia. Sementara data lain menyebutkan sebanyak 9 orang sejak 22-24 Mei 2019 (Briantika, 2019). Pasca masyarakat versus pemerintah, pada bulan Agustus aksi protes merembes ke Papua merespon rasisme di Jawa Timur. Aksi protes tersebut pada kelanjutannya memicu tindakan kekerasan di Wamena dalam bentuk pembakaran bangunan publik. Kerusuhan di Wamena setidaknya mengakibatkan 42 orang meninggal dunia. Selama 2019 di seluruh wilayah Indonesia diungkap Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) terdapat sejumlah 78 kasus pelanggaran pada aksi protes. Dari kasus ini, sejumlah 51 orang mengalami korban jiwa, sebanyak 44 orang di antaranya mati dengan alasan yang masih belum diketahui (YLBHI, 2020).

Beberapa isu dominan periode 2016-2020 adalah isu anti Cina, komunisme, dan konflik agraria. Selama 2015-2019 KPA mencatat ada 2.047 konflik agraria. Jumlah meningkat sebanyak dua kali lipat di banding rezim sebelumnya (CNN Indonesia, 2020). Sementara di sisi lain, konflik kekerasan rentang 2016-2017 tercatat sebanyak 163 kasus dengan dominan dilakukan oleh aparat negara (Hanifah, 2017). Selain kekerasan negara, penganiayaan individu yang menyebabkan luka dan kematian juga terjadi hingga September 2020, dengan target utama kepada tokoh agama.

Periode 2014-2020 pemerintah memegang kendali narasi yang cukup besar terhadap kebebasan masyarakat berekspresi termasuk pada konteks media atau pers dalam memberi gambaran faktual berbagai insiden. Demikian, negara lebih cenderung melakukan kekerasan terhadap rakyat. Oleh YLBHI (2020) menegaskan bahwa aparat negara masih sangat minim untuk menghormati dan melindungi berbagai hak asasi manusia dalam prinsipnya yang *fair trial*. Aparat negara justru menjadi aktor kekerasan dan aktor kriminalisasi terhadap hak

¹⁰ Sebagian analisis menyebut kehadiran gelombang protes berskala besar ini sebagai kebangkitan gerakan populisme Islam atau populisme keagamaan di Indonesia. Berbagai studi yang menjelaskan ini misalnya studi Vedi Hadiz, Ranga Kusumo, dan lain lain.

kebebasan dan impunitas terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Pada tahun 2019, aparat kepolisian justru sebagai aktor yang mempertontonkan tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang cukup besar dalam merespon berbagai tindakan penyampaian pendapat dan aspirasi publik.

2.4. Mendekonstruksi Wacana Pluralitas Sebagai Akar Konflik Kekekarasan

Ketika membicarakan pluralitas, tergambar berbagai perbedaan suku, agama, ras, dan antar-golongan yang berbeda yang hidup dalam suatu setting masyarakat tertentu. Dan, perbedaan ini selalu dipandang menjadi tantangan terhadap harmoni sosial. Laclau & Mouffe (2008) Mouffe (2000) memberi pandangan bahwa pluralisme adalah merupakan ciri dasar yang membentuk identitas masyarakat demokrasi. Keberagaman masyarakat baik dari sisi kultur, agama, nilai, dan etnik akan memproduksi relasi antara kelompok dengan berbeda kepentingan (*antagonis*). Relasi antagonis adalah sebuah keniscayaan. Dalam menyikapi antagonisme sebagai yang nyata dalam masyarakat, Mouffe (2000) menekankan bahwa relasi pluralitas “kelompok dan kepentingan” bukan sebagai relasi persaingan antara kawan dan lawan (*friend-enemy*) dengan menjadikan lawan sebagai musuh, melainkan hubungan persaingan yang harus “bersifat bersahaja” antara kawan dan lawan (*friend-adverseries*).

Pada sisi lain, Sen (2016) juga menawarkan cara pandang tentang keragaman sebagai keniscayaan yang mesti difahami secara lebih tepat. Akar-akar konflik berbasis pada SARA selama ini baik pada aras lokal maupun global seperti konflik di India, Yugoslavia, Palestina-Israel, Uighur, Rohinya serta negara lain dengan mengatas-namakan etnis atau agama, termasuk pengalaman Indonesia sendiri sejatinya adalah merupakan bentuk kekeliruan dalam berfikir dan kekeliruan dalam menalar kenyataan identitas. Sehingga identitas dianggap sebagai yang bersifat tunggal. Persepsi seperti ini memiliki konsekuensi bahwa satu identitas akan merasa bersifat lebih unggul dari yang lain (baca Huntington tentang benturan peradaban). Pada faktanya, setiap individu ataupun kelompok masyarakat merupakan jalinan identitas yang jamak.

Narasi selama ini terhadap suku, agama, ras, dan antar-golongan yang berbeda selalu dijadikan objek baik oleh pemerintah maupun sebagian besar pengamat atau ahli sebagai akar penyebab konflik harus difikirkan ulang. Narasi besar ini harus diruntuhkan (baca Lyotard dalam (Agger, 2009; Ritzer & Goodman, 2014) untuk membuka kemungkinan pemahaman lain yang lebih relevan terhadap kondisi masyarakat kontemporer saat ini. Masyarakat kontemporer dicirikan sebagai suatu masyarakat yang telah mengalami transformasi radikal yang terkoneksi satu sama lain; terkoneksi dengan berbagai etnis dan bangsa lain, batas-batas geopolitik semakin menipis, adanya interseksi generasi, dan “berdampingnya perbedaan” secara lebih bersahaja semakin nyata. Artinya, ciri masyarakat seperti ini menandai identitas yang jamak.

Wacana terhadap SARA mesti didekonstruksi. Dekonstruksi dikenalkan Derrida (1978) sebagai suatu cara atau metode interpretasi atas teks, wacana, dan peristiwa/fenomena. Melalui metode dekonstruksi akan dapat terlihat adanya relasi kepentingan dan metode interpretasi. Bahwa cara individu, kelompok, maupun suatu rezim yang berkuasa dalam menginterpretasikan berbagai fenomena sosial syarat dengan kepentingan tertentu. Untuk itu, Derrida menegaskan setiap orang boleh melakukan interpretasi atas teks (baca: teks bukan

sekedar tulisan, tetapi juga fenomena sosial) agar berbagai bentuk dominasi dapat dibongkar.

Dekonstruksi Derrida berupaya untuk memperlihatkan akan adanya pandangan dan pemikiran-pemikiran lain yang dapat menjadi alternatif di tengah wacana yang sudah ada berkembang (Hoed, 2011). Dekonstruksi tidak dimaksudkan untuk mengeliminasi atau penghancuran suatu wacana dengan tanpa adanya suatu solusi. Dekonstruksi mengajukan wacana baru yang diorientasikan untuk mengurai dan atau bahkan menggantikan wacana yang telah dominan berkembang.

Melalui dekonstruksi, Derrida berkehendak untuk menekankan bahwa wacana dominan bisa dibongkar dan kemudian hal-hal alternatif lainnya dapat dijadikan sebagai wacana kebenaran baru (Agger, 2009; Hoed, 2011). Demikian, Derrida memiliki relasi kesepahaman terhadap Foucault bahwa pengetahuan, kebenaran dan kekuasaan memiliki tautan. Oleh Foucault (dalam Azwar & Muliono, 2020) kekuasaan sesungguhnya menciptakan suatu pengetahuan mengenai apa yang dianggap sebagai “kebenaran”. Pengetahuan dikonstruksi melalui wacana yang kemudian secara diskursif menciptakan kekuasaan untuk menjadikannya sebagai sebuah kebenaran. Dekonstruksi Derrida dapat dijadikan ruang untuk kehadiran pluralitas pemikiran, wacana, dan serta penyikapan berbagai masalah relasi sosial khususnya dalam cara pandang terhadap pluralitas: suku, agama, ras, dan antar-golongan yang selalu dijadikan “biang keladi” terjadinya konflik kekerasan.

Wacana pluralitas: suku, agama, ras, dan antar-golongan melalui pembacaan dekonstruksi, menyuguhkan pemahaman pada sudut lain bahwa SARA merupakan wadah, serta sebagai spirit pemberdayaan (*empowerment*) dalam menghadapi masalah sosial khususnya konflik baik pada skala makro maupun mikro. Institusi dan elemen dari suku, agama, ras dan golongan dapat menjadi wadah aspirasi dan kepentingan sehingga berbagai aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat dapat disalurkan melalui elemen tersebut. Elemen tersebut juga dapat dijadikan sebagai tempat berlindung dari kemungkinan masalah sosial yang tidak dapat diselesaikan oleh negara. Bagaimanapun, SARA memiliki tautan rasa yang lebih dalam di masyarakat, memiliki relasi dan keterikatan yang relatif lebih kuat, dan memiliki kepentingan bersama berdasarkan suatu kesadaran sosial.

Merujuk kepada Osborn dan Gaebler (dalam Wirutomo, 2012), komunitas (baca: SARA) lebih mampu melihat potensi yang dimiliki anggotanya dibanding dengan organisasi formal lainnya. Elemen suku dan agama harus dilihat sebagai modal sosial untuk membangun masyarakat, termasuk sebagai sarana resolusi konflik. Sebagaimana diajukan Fukuyama (2002), ketika suatu komunitas sudah mempunyai potensi modal sosial, maka berikutnya ialah memanfaatkan modal sosial itu melalui penciptaan norma informal bersama, merekatkan relasi di antara dan serta memperluas relasi komunitas (*commitment*), memelihara kepercayaan (*trust*), dan memperluas pengaruhnya ke luar komunitas suatu identitas.

Indonesia pada kenyataannya telah dianugrahi dengan pluralitas komunitas (baca: SARA). Kesadaran potensi ini telah diteguhkan pula ke dalam makna *bhineka tunggal ika*. Elemen perbedaan tersebut pada dasarnya telah menjadi modal sosial untuk proses pemberdayaan dan kemajuan demokrasi apakah itu sebagai arena inklusivitas, akses pada informasi, partisipasi, dan penguatan

(*strenghtening*) kapasitas keorganisasian masyarakat lokal untuk bukan saja menciptakan harmoni sosial tetapi juga kemajuan dalam bentuk ketahanan (*sustenance*). Namun demikian, konsep ini tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan wacana dan kebijakan yang lebih memihak kepada berbagai berbagai entitas masyarakat dengan kekayaan dan keragaman nilai, suku, agama, dan ras.*

3. KESIMPULAN

Perubahan sifat konflik kekerasan di Indonesia sangat dipengaruhi bagaimana perkembangan dinamika iklim sosial, ekonomi, dan politik. Dikatakan politik, karena konflik kekerasan memiliki relasi dengan sistem pemerintahan suatu rezim. Penguasa memiliki otoritas penuh dalam mana menundukkan masyarakat untuk mencapai kepentingan politik; baik untuk mempertahankan kekuasaan maupun merebut sumber daya. Pembacaan terhadap konflik ini memuat bagaimana negara menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan berbagai bentuk kekerasan. Pada aspek ekonomis, konflik kekerasan dipengaruhi oleh adanya krisis yang dapat dilihat dari tingkat kemiskinan dan sulitnya bagi masyarakat untuk mendapatkan akses sumber daya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sementara pada aspek sosial, konflik kekerasan seringkali dilatari oleh persoalan isu identitas, moral, keagamaan dan sejenisnya. Ketiga ini harus dilihat sebagai satu kesatuan yang saling berkait-kelindan. Setiap peristiwa konflik kekerasan tidak hadir dalam ruang yang vacuum dan tidak pula berakar pada sebab yang tunggal.

Untuk menyimpulkan secara singkat, pola perubahan konflik di Indonesia dapat dipetakan berdasarkan pada rentang periode waktu. Rentang periode 1998 dan sebelumnya, pola konflik bercorak “disponsori” oleh negara dengan isu anti komunis. Pada tahun 1999-2004 konflik kekerasan bercorak komunal yaitu konflik sesama masyarakat dengan isu utama adalah isu identitas. Pada periode 2004-2015 cenderung pada isu moral moral/tersinggung, penganiayaan, dan perkelahian yang kemudian mengakibatkan berbagai kekerasan. Periode 2016 hingga 2020 pola konflik dominan bercorak konflik vertikal antara masyarakat sipil berhadapan dengan pemerintah, terutama didominasi oleh kalangan umat Islam yang secara politik termarginalkan.

Fragmentasi jaringan patronase pada zaman Orde Baru secara langsung telah mendorong adanya penurunan kekerasan yang disponsori oleh negara, tetapi pada saat yang sama jumlah kelompok masyarakat sipil berbasis komunal melakukan kekerasan dan intimidasi sebagai strategi politik, sosial, dan ekonomi mengalami peningkatan. Setiap kelompok atau golongan mengartikulasikan ideologi yang melegitimasi penggunaan kekerasan melalui wacana etnis, kelas, dan afiliasi agama. Kekerasan juga dibenarkan sebagai tindakan rektifikasi secara langsung oleh mereka yang menjadi oposisi, dalam situasi di mana negara dianggap gagal memberikan hak-hak dasar seperti keamanan dan keadilan.

Melalui pembacaan dekonstruksi, wacana kekerasan berbasis pluralitas suku, agama, ras, dan antar golongan menegaskan bahwa akar konflik kekerasan disandarkan kepada karakter, temperamen dan kultur politik komunitas yang bersangkutan. Konflik kekerasan harus dipandang sebagai adanya realitas sosial yang lebih luas seperti ekonomi dan iklim rezim penguasa pada rentang periode waktu tertentu. Pembacaan dekonstruksi ingin menegaskan, bahwa pluralitas

suku, agama, dan rasa merupakan wadah, serta sebagai mobilisator pemberdayaan (*empowerment*) dalam menghadapi dan memecahkan masalah sosial khususnya konflik sosial baik pada skala makro maupun mikro. Institusi dan elemen dari suku, agama, ras dan golongan dapat menjadi wadah aspirasi dan kepentingan, sehingga berbagai aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat dapat disalurkan melalui elemen tersebut dengan cara yang konstruktif dan demokratis.*

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, H. I. (2004). *Akar Konflik Sepanjang Zaman- Hakimul Ikhwan Affandi*. Pustaka Pelajar. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jp.v7i2.2414>
- Agger, B. (2009). *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan dan implikasinya* (Terj). Kreasi Wacana.
- Ali-Fauzi, I., Alam, R. H., & Panggabean, S. R. (2009). *Pola-pola konflik keagamaan di Indonesia, 1990-2008*.
- Asia Report. (2007). *Aceh : Komplikasi Paska Konflik*.
- Aspinall, E., & Berger, M. T. (2001). The break-up of Indonesia? Nationalisms after Decolonisation and the Limits of the Nation-state in Post-cold war Southeast Asia.
- Azwar, W., & Muliono. (2020). *Sosiologi Dakwah*. Prenada Media Group.
- Barron, P., Jaffrey, S., & Varshney, A. (2014). *How Large Conflicts Subside: Evidence from Indonesia* *How Large Conflicts Subside: Evidence from Indonesia* (Indonesian). The World Bank.
- Bertrand, J. (2004). *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. Cambridge University Press.
- Briantika, A. (2019). *Protes Politik Sepanjang 2019: Direpresi Habis-habisan*. Tirto.Id.<https://tirto.id/protes-politik-sepanjang-2019-direpresi-habis-habisan-epiL>
- CNN Indonesia. (2020). *Konflik Lahan Era Jokowi 2 Kali Lipat dari 2 Periode SBY*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200106132321-20-462771/konflik-lahan-era-jokowi-2-kali-lipat-dari-2-periode-sby>
- Cribb, R. (1991). *The Indonesian Killings of 1965-1966 Studies from Java and Bali* (R. Cribb (ed.)). Centre of Southeast Asian Studies.
- Deutsch, M., Coleman, P. T., & Marcus, E. C. (2016). *Handbook Resolusi Konflik*. Nusamedia.
- Fahmi, C. (2014). *Jejak Konflik Baru di Aceh: Pemetaan Jenis & Sumber Konflik Politik, Hukum, Sumber Daya Alam, Agama, Etnis dan Ekonomi*. Kesbangpol dan Linmas Provinsi Aceh.
- Fatmawati, N. I. (2020). Pierre Bourdieu dan Konsep Dasar Kekerasan Simbolik. *MADANI: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(1), 41–60. <http://www.e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/1899>
- Fromm, E. (2008). *Akar Kekerasan: Analisis Sosio-Psikologis atas Watak Manusia*. Pustaka Pelajar.
- Fukuyama, F. (2002). *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran* (Terjemahan). Qalam.
- Galtung, J., & Fischer, D. (2013). *Pioneer of Peace Research* (June 11, 2). Springer.

- Hanifah, S. (2017). *Catatan Pelanggaran HAM yang Terjadi di Era Jokowi-JK versi KontraS*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/peristiwa/catatan-pelanggaran-ham-yang-terjadi-di-era-jokowi-jk-versi-kontras.html>
- Heryanto, A. (2006). *State Terrorism and Political Identity in Indonesia: Fatally Belonging*. Routledge.
- Hoed, B. H. (2011). *Semiotik dan Dinamika Sosial Budaya* (1st ed.). Komunitas Bambu.
- Irwandi, & Chotim, E. R. (2017). Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung). *JISPO*, 7(2), 24–42.
- Kammen, D., & Zakaria, F. (2012). Detention in Mass Violence. *Critical Asian Studies*, 44(3), 441–466. <https://doi.org/10.1080/14672715.2012.711979>
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2015). *Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) Laporan Bulanan*.
- Klinken, G. van. (2007). *Communal Violence and Democratization in Indonesia Small town wars*. Routledge.
- Kompas.com. (2020). *Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas KPSS Meninggal Dunia*.
- Laclau, E., & Mouffe, C. (2008). *Hegomoni dan Strategi Sosialis-Post Marxisme dan Gerakan Sosial Baru*. Resist Book.
- Liem Soei Liong. (2020). “It’s the Military, Stupid!,” in *Freek Colombijn and J. Thomas Lindblad (eds.) Roots of Violence in Indonesia: Contemporary Violence in Historical Perspective*: Institute of Southeast Asian Studies.
- Mittal, D., & Ranjan, A. (2016). India-Pakistan: Contours of Relationship. *Space and Culture, India*, 4(1), 6–18. <https://doi.org/10.20896/saci.v4i1.192>
- Mouffe, C. (2000). The Democratic Paradox. In *The democratic paradox*. British Library CaraloguillJ in Publication.
- Ningtyas, E. (2015). Pierre Bourdieu, Language and Symbolic Power. *Poetika*, 3(2), 154–157. <https://doi.org/10.22146/poetika.v3i2.10437>
- Panggabean, S. R., & Smith, B. (2011). Explaining Anti-Chinese Riots in Late 20th Century Indonesia. *World Development*, 39(2), 231–242. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.11.036>
- Purdey, J. (2006). *Anti-Chinese Violence in Indonesia, 1996–199*. Singapore University Press.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2014). *Teori Sosiologi Modern*. Kencana Prenada Media Group.
- Robinson, G. (1995). *The Dark Side of Paradise: Political Violence in Bali*. Cornell University Press.
- Sen, A. (2016). *Kekerasan dan Identitas*. Marjin Kiri.
- Silvestri, S. (2015). *The Role of Religion in Conflict and Peacbuilding*. The British Academy.
- Susan, N. (2014). *Sosiologi Konflik*. Prenada Media Group.
- Tajima, Y. (2013). The Institutional Basis of Intercommunal Order: Evidence from Indonesia’s Democratic Transition. *American Journal of Political Science*, 57(1), 104–119. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2012.00631.x>
- The Habibie Center. (2013). *Map of Violence in Indonesia (May-August 2013) and Land Dispute between Local Residents in Nusa Tenggara Timur*

- Province* (05/Novembe). The Habibie Center.
<http://snpk.kemenkopmk.go.id/Docs/EN-THC-Ed5.pdf>
- Wirutomo, P. (2012). *Sosiologi untuk Jakarta: Menuju Pembangunan Sosial Budaya*. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta.
- World Bank. (2010). *Pola-pola Baru Kekerasan di Indonesia: Data Awal dari Enam Provinsi dengan Pengalaman Berskala Tinggi*.
- YLBHI. (2020). *Reformasi Dikorupsi Oligarki. Laporan Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019*.